

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., dan Jogiyanto. (2009). *Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ainul, Nazilatul & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9-19.
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 12(1), 66-74.
- Ermawati & Afifi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Stikubank University Journal*, 655-662.
- Fahrika, Ika. A & Roy J. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh. *Journal Feb.Unmul*, 16(2), 206-213.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 19-27.
- Fernando & Arisman, A. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). *Jurnal STIE MDP*, 1-14.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0 :Edisi 2*. Universitas Diponegoro.

Imaniati, Zaen Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 123-135.

<https://www.indopremier.com>. 2019. “Ini 4 Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak”
[https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Ini 4 Strategi i Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Ini_4_Strategi_Kemenkeu_Tingkatkan_Kepatuhan_Pajak) [diakses pada 11 Oktober 2021].

Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2017-2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak.

Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tentang Data UMKM.

Liu, Xin. (2014). Use Tax Compliance: The Role of Norms, Audit Probability, and Sanction Severity. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. 18(1). 65-79.

Mardiasmo, Prof. Dr. MBA, Ak. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

Mariani, dkk. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89-100.

Mandowally, Bilha M. F., dkk. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di

KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.

Neve, Jan-Emmanuel De. (2019). How to Improve Tax Compliance? Evidence from Population-wide Experiments in Belgium. *CEP Discussion Paper: Economic & Social Research Council*, 1621, 1-70.

Novitasari, Ria, dkk. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP 23/2018 Di KPP Pratama Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(9), 84-94.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 *tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 2018. Jakarta: Menteri keuangan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 *tentang Perubahan Postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2020*. Jakarta: Menteri keuangan Republik

Rahayu, Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.

Rahayu, Siti Kurnia. (2017:193). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Robbins, S.P. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhallindo.

Sabet, Eli, dkk. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 1(2),

85-95.

Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126-135.

Sari, Viega A. (2017). Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), 745-760.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, edisi 6, buku 2. Jakarta : Salemba Empat.

Siahaan, Stefani & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-14.

Sudrajat, Ajat & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2), 193-202.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011.

Syahputri, Nindya. (2020). Pengaruh Sistem E-Filing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 10-26 .

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Veronica, Aldeya. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1-15.

Wardani, D. K., & Erma Wati. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1),33-54.

Warouw, Jounica Z. S., dkk. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Manado dan Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 585-592.

Winerungan, Oktaviane L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

Wulandari, Tuti. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1-15.